

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Januari 2021

Kepada Yth.

Paniradya Pati/Inspektur/ Sekretaris
DPRD/Kepala Dinas Daerah/Kepala
Badan Daerah/ Kepala Satpol PP/
Kepala Biro/ Kepala Badan
Penghubung di Lingkungan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta

di YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR: 5/SE/I/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PELAKSANAAN TATA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

Dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan kantor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka pelaksanaan tata kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* diatur sebagai berikut:

- membatasi aktivitas perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan work from office (WFO) sebesar 25% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- 2. Kepala Perangkat Daerah mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan work from home (WFH) dan work from office (WFO) pada unit kerja masing-masing.
- Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian pelaksanaan tugas kedinasan pada unit kerja masing-masing, dengan menetapkan target kerja selama WFH.
- melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online), antara lain kegiatan belajar mengajar pada pendidikan menengah dan institusi pelatihan.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021, dan pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/SE/I/2021 tentang Pelaksanaan Tata Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tanggal 11 Januari 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR

DAERAHUSTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X